

SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Condong catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283, Indonesia, Telepon:+62-0274-881546 - 885376
E-mail: jakasriyana@uii.ac.id

Abstract: This paper aims to investigate the effect of the factors that determine local government own revenue in the districts /cities in West Java province. We analyze the data of all districts/cities in the period of 2006 until 2009. Analyses were performed by a panel data regression method. Based on the results of analysis we obtained that the number of industries, population and gross domestic product has positive and significant impact on revenue. This result is a portrait of society that economic activity is indicated by gross domestic product growth and the industry has strong links with the government sector, particularly with regard to revenue receipts. From the other side, it can also be concluded that the activities of local governments will depend on private sector economic activity.

Keywords: local government own revenue, gross regional product, economics, the number of industries, the private economic sector

Abstrak: Paper ini bertujuan mengetahui pengaruh faktor-faktor yang menentukan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Data yang dianalisis adalah data semua kabupaten dalam kurun waktu tahun 2006-2009. Analisis dilakukan dengan metode regresi data panel. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa jumlah industri, penduduk, dan pendapatan domestik bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB dan jumlah industri memiliki hubungan erat dengan sektor pemerintah, khususnya berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah. Dari sisi lain dapat disimpulkan juga bahwa kegiatan pemerintah daerah akan sangat tergantung kepada kegiatan ekonomi sektor swasta.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, pendapatan domestik bruto, jumlah industri, sektor ekonomi swasta

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan

jalannya organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah, baik dalam penggalian maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan peman-

faatan sumberdaya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak daerah yang memiliki perbedaan alokasi anggaran, potensi, serta keunggulan. Perbedaan dalam pengalokasikan anggaran terlihat dalam jumlah anggaran yang diberikan pemerintah untuk tiap daerah tergantung pada kebutuhan di tiap daerah tersebut. Ada beberapa sumber dana yang diberikan oleh pemerintah untuk kemajuan tiap daerah. Dana tersebut antara lain dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, juga beberapa pinjaman dari luar negeri serta sumber dana pemerintah yang lain (Mark, 2004).

Otonomi daerah di satu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, namun di sisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian untuk mengelola dan mengatur rumah tangga sendiri akan terwujud dengan baik apabila terdapat dukungan (partisipasi) publik. Hal ini relatif akan dapat terwujud bila terjadi proses distribusi, baik pada kebutuhan masyarakat maupun perolehan serta pembagian pendapatan untuk daerah dan masyarakat secara merata.

Otonomi daerah dilaksanakan pada saat daerah mempunyai tingkat kesiapan yang berbeda, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan manajerial daerah. Suatu daerah mampu melaksanakan otonomi jika memiliki kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber ke-

uangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun demikian untuk daerah kota dan kabupaten di Indonesia belum bisa melaksanakannya (Sasana, 2005; Siagian, 2008).

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Suryono (2010), otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Dalam hal ini kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Abdullah dan Halim, 2003; Riduansyah, 2003; Santosa dan Rahayu, 2005).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arus pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merefleksikan peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi penda-

patan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2006-2009 kabupaten/kota yang memberikan peranan relatif besar dalam pembentukan PDRB provinsi Jawa Barat, yaitu berasal dari kabupaten Bekasi sebesar 51.789 miliar, kabupaten Bogor sebesar 30.952 miliar, dan kabupaten Bandung sebesar 29.228 miliar. PDRB atas dasar harga konstan. Dilihat dari potensi kabupaten/kota, penyumbang terbesar terhadap total PDRB Jawa Barat, merupakan daerah konsentrasi industri pengolahan khususnya industri pengolahan barang mentah menjadi barang jadi, seperti rokok, suku cadang mobil maupun motor, serta alat-alat rumah tangga, dan setiap harinya menghasilkan miliaran output yang akan berpengaruh terhadap pendapatan di provinsi Jawa Barat. Dengan adanya peningkatan PDRB antarkabupaten/kota maka hal ini berarti ada perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi Jawa Barat, bisa dikatakan bahwa provinsi Jawa Barat sangatlah makmur akan penghasilan yang didapatkan dari PDRB tersebut.

Perkembangan industrialisasi di Indonesia juga merupakan faktor penting dalam pembentukan pendapatan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir ini sudah sangat banyak sekali industri, mulai dari industri yang paling kecil hingga industri yang paling besar, dimana setiap industri itu memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar, juga terhadap keuangan negara ini khususnya di daerah-daerah yang banyak memiliki jumlah industri, namun secara tidak langsung juga memberikan dampak negatif kepada lingkungan sekitar dengan membuang limbah sembarangan ataupun bisa merugikan negara dengan tidak membayar pajaknya, tapi secara umum sektor perindustrian sangat memberikan nilai menguntungkan, terutama dari sektor industri pengolahan yang mana sektor tersebut sudah

cukup memberi kontribusi besar bagi negara ini.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa yang mengalami kemajuan pesat dari segi pendapatan asli daerah nya, sebagian besar pendapatan tersebut dihasilkan dari sumber-sumber yang memengaruhinya seperti pajak, retribusi, dan lain-lain yang telah disahkan, daerah yang cukup potensial antara lain kota Bandung, kabupaten Bogor dan kota Bekasi, akan tetapi yang paling besar yang memberikan kontribusi PAD di Jawa Barat ialah kota Bandung, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai pada tahun 2009 kota Bandung menghasilkan PAD sebesar 374.712 (jutaan rupiah) hal ini dikarenakan selain kota Bandung adalah ibukota Jawa Barat tetapi juga kota Bandung merupakan kota dimana serba ada, mulai dari kebutuhan pariwisata, kebutuhan primer maupun kebutuhan yang lainnya, sehingga di sana terjadinya transaksi ekonomi yang secara tidak langsung pengaruhnya dapat meningkatkan PAD di provinsi Jawa Barat itu sendiri.

Provinsi Jawa Barat juga mempunyai sektor industri yang cukup berkembang, mulai dari industri rumah tangga sampai dengan industri yang besar, daerah industri yang memberikan kontribusi besar sampai tahun 2009 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ialah kabupaten Sukabumi dengan jumlah industri sebanyak 15.379 jumlah unit industri, industri di Jawa Barat sangat potensial, contohnya di Jawa Barat memiliki banyak industri pariwisata, yang tiap harinya ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun lokal, serta industri rumah tangga yang membuat barang mentah sehingga menjadi barang jadi, seperti sepatu kulit, tas, pernak pernik dan lain-lain, bahkan penjualannya ada yang sudah sampai di ekspor ke sejumlah negara besar di dunia. Jumlah industri tersebut nantinya akan menghasilkan suatu output yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah daerah tersebut, dan pajak tersebut akan menjadi suatu pemasukan untuk provinsi Jawa Barat.

Faktor lain yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah kualitas dan jumlah penduduk. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal disuatu

wilayah tertentu. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Semakin banyak orang maka akan semakin banyak ide, semakin banyak orang yang mempunyai bakat dan kreatif, semakin banyak tenaga ahli dan dengan demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk merupakan suatu keuntungan. Simon juga mencatat bahwa, pertumbuhan penduduk juga merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan mendorong "*economic of scale*" dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya produksi.

Penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini selanjutnya dapat mendorong peningkatan produksi sehingga akan mengakibatkan adanya perluasan usaha dan pendirian usaha baru pada sektor produksi, pendirian usaha baru akan menambah lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat juga ikut meningkat. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak hal yang menjadi dampak positif terhadap provinsi Jawa Barat itu sendiri, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka pendapatan pemerintah akan naik secara tidak langsung. Oleh karena itu, seiring berkembangnya jumlah penduduk di Jawa Barat akan juga akan meningkatkan perkembangan ekonomi di provinsi Jawa Barat itu sendiri.

Atas dasar latar belakang tersebut perlu dilakukan suatu analisis terhadap berbagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah kota dan kabupaten di provinsi Jawa Barat. Kajian ini bertujuan menguji pengaruh faktor-faktor jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengkaji tentang keuangan daerah di Indonesia, khususnya sejak diberlakukannya

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Adriani dan Handayani (2008), melakukan penelitian tentang pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap PAD kabupaten Merangin. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan secara parsial terhadap PAD Kabupaten Merangin, tetapi secara bersamaan kedua variabel tersebut pengaruhnya adalah signifikan. PDRB dan jumlah penduduk mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan PAD dan model yang diestimasi adalah tepat.

Siagian (2008) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), PAD, dan pendapatan lain-lain yang sah terhadap belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sampel sebanyak 12 kabupaten/kota. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data *time series* yakni data tahun 2004-2006 dari laporan APBD (anggaran) yang diperoleh melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pengujian hipotesis dalam pengujian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan uji T, dan regresi linier berganda dengan uji F, regresi sederhana digunakan untuk melihat pengaruh jumlah DAU, PAD dan pendapatan lain-lain secara terpisah terhadap jumlah total belanja. Regresi berganda digunakan dengan tujuan untuk memprediksi apakah komponen-komponen pendapatan daerah tersebut secara serentak mempengaruhi belanja daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara terpisah ataupun secara bersama-sama Dana Alokasi Umum (DAU), PAD, dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

Abdullah dan Halim (2003), melakukan penelitian untuk menguji pengaruh pajak daerah dan PAD terhadap belanja daerah di Indonesia dengan menggunakan sampel kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2001 dan 2002 dari laporan

APBD pemda yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dari hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama pajak daerah dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.

Santosa dan Rahayu (2005), melakukan penelitian tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Kediri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi persentase perubahan PAD adalah total pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB sangat kuat. Ketiga variabel independen Pengeluaran Pembangunan, Penduduk, dan PDRB yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri.

Pembangunan ekonomi suatu negara dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut. Dimulai dari ekonomi tradisional yang dititikberatkan pada sektor pertanian, menuju perekonomian modern yang didominasi oleh sektor industri. Perubahan struktur ekonomi pada umumnya disebut transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai rangkaian perubahan dalam komposisi permintaan, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), produksi, dan penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Octaviani, 2001).

Dalam istilah ekonomi, industri juga mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua

usaha atau kegiatan di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri ialah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia yang sangat penting. Melalui kegiatan industri akan dihasilkan berbagai kebutuhan manusia mulai dari peralatan sederhana sampai peralatan modern. Jadi pada dasarnya kegiatan itu lahir untuk memenuhi kegiatan manusia. Dengan kata lain telah dikenal sejak zaman dahulu walaupun pada awal perkembangannya masih sangat sederhana dan terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan dalam lingkup yang terbatas.

Industri dapat digolongkan berdasarkan beberapa sudut tinjauan atau beberapa pendekatan. Di Indonesia digolongkan berdasarkan kelompok komoditas, skala usaha, dan berdasarkan arus produksinya. Jumlah industri di Indonesia kini semakin pesat perkembangannya. Hal itu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri, dimana ketika sebuah industri itu dibangun banyak hal yang akan terjadi, seperti penyerapan tenaga kerja, memperbanyak output baik barang maupun jasa sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan daerah dapat dipengaruhi berbagai macam faktor, salah satu di antaranya dari sektor industri, ketika suatu daerah tersebut memiliki banyak perindustrian maka bukan tidak mungkin daerah tersebut akan menjadi makmur dan dapat mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Pengaruh tersebut dimulai dari pajak-pajak yang dikenakan oleh pemerintah setempat dan nanti akan dikembalikan lagi oleh pemerintah dalam bentuk layanan publik (Merifield, 2000). Jadi secara tidak langsung sektor industri memberikan pengaruh terhadap pendapatan daerah tersebut, contohnya sebuah industri yang telah dibangun akan

membuat bangunan inti dimana akan menjadi tempat produksi, dan industri tersebut akan menghasilkan sebuah output baik barang maupun jasa, lalu barang itu akan dijual kepada konsumen, bangunan tersebut nantinya akan dikenakan pajak bumi bangunan (PBB) lalu *output* yang dihasilkan akan dikenakan pajak produksi oleh pemerintah, dari tahapan-tahapan inilah yang mempengaruhi pendapatan daerah tersebut (Riduansyah, 2003; Sasana, 2005).

Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara. Setiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia merupakan modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai *aset* apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif. Indonesia sedang mengalami transisi demografi menuju penduduk tua yang justru berpengaruh negatif terhadap penerimaan pemerintah (Sriyana, 2008).

Pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

METODE PENELITIAN

Data dan Variabel Operasional

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data *time series* dan *cross section*. Data yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu, pendapatan asli daerah, jumlah industri, jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto di provinsi Jawa Barat. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat. Variabel-variabel yang digunakan dalam kajian ini adalah PAD, jumlah industri, PDRB di kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2006 sampai 2009. Data-data tersebut berdasarkan harga konstan sehingga mampu menunjukkan perkembangan riil.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi panel data yang merupakan bentuk regresi untuk menganalisis kombinasi data antara deret waktu (*time-series*) dan kerat lintang (*cross section*). Dalam model regresi data panel, persamaan model regresi dengan menggunakan data cross-section dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \quad (1)$$

dimana: N adalah banyaknya data *cross section*. Untuk persamaan model dengan data *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \quad (2)$$

dimana: T adalah banyaknya data *time-series*. Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana: N adalah banyaknya observasi, $N \times T$ adalah banyaknya data panel, T adalah banyaknya waktu.

Dalam kajian ini, sesuai dengan variabel yang dianalisis, model regresi dapat ditulis:

$$Y_{it} = b_0i + b_1x_{1it} + b_2x_{2it} + b_3x_{3it} + e_{it}$$

dimana: Y_{it} adalah PAD, x_{1it} adalah jumlah industri, b_0 adalah konstanta, x_{2it} adalah jumlah penduduk, b_1 , b_2 , b_3 adalah koefisien, x_{3it} adalah PDRB, e_{it} adalah error.

Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk bekerja dengan data panel. Metode pertama adalah pendekatan *pooled least square* (PLS), yang secara sederhana menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* dan kemudian mengestimasi model dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Model kedua adalah pendekatan *fixed effect* (FE) yang memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variables* dimana hal ini mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Model dengan FE menambahkan *dummy variables* untuk memungkinkan adanya perubahan *intercept* ini. Model ketiga adalah pendekatan efek acak (*random effect*). Model ini berasumsi memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan faktor kesalahan dari *cross section* dan *time series*. Model *random effect* adalah variasi dari estimasi *generalized least square*. Metode *fixed effect* dan *random effect* disebut juga metode *generalized least square* (GLS).

(1) Pendekatan Pooled Least Square (PLS) atau (Common effect). Estimasi *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan metode OLS dalam mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antarwilayah sama dalam berbagai kurun waktu. Dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan regresinya:

$$Y_{it} = b_0 + b_1x_{1it} + b_2x_{2it} + b_3x_{3it} + \dots + e_{it} \quad (4)$$

(2) Pendekatan Slope Konstan tetapi Intercept Berbeda Antarindividu (Fixed effect). Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah

bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antarwaktu (*time-series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*).

Model Fixed Effect dengan *variable dummy* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = b_0i + b_1x_{1it} + b_2x_{2it} + b_3x_{3it} + \beta_4 D_{1it} + \beta_5 D_{2it} + \beta_6 D_{3it} + \dots + e_{it} \quad (5)$$

Model Fixed Effect dengan tanpa variabel *dummy* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = b_0i + b_1x_{1it} + b_2x_{2it} + b_3x_{3it} + \dots + e_{it} \quad (6)$$

(3) Pendekatan efek acak (Random effect). Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar-error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*). Pendekatan estimasi *Random Effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antardaerah. Penulisan konstanta dalam model *Random Effects* tidak lagi tetap tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dalam model sebagai berikut:

$$Y_{it} = b_0i + b_1x_{1it} + b_2x_{2it} + b_3x_{3it} + \dots + e_{it} \quad (7)$$

Pemilihan Model

Karena adanya berbagai asumsi dan kemungkinan hasil yang berbeda pada analisis dengan regresi data panel, maka diperlukan pemilihan model yang tepat untuk dapat menggambarkan hasil analisis yang terbaik. Ada dua uji yang dapat digunakan untuk memilih model terbaik,

yaitu:

(1) **Uji F:** digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau model *fixed effect*, dimana setelah melakukan regresi antara model *common effect* dan model *fixed effect* pemilihannya dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F statistiknya. *Ho:* Memilih model *common effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya tidak signifikan. *H1:* Memilih model *fixed effect*, jika nilai probabilitas F statistiknya signifikan.

(2) **Uji Hausman:** Digunakan untuk memilih model yang terbaik antara *fixed effect* dan *Random Effect*, dimana setelah melakukan regresi antara model *fixed effect* dan *random effect* pemilihannya dilakukan dengan melihat nilai probabilitas Chi-square-nya. *Ho:* Memilih model *random effect*, jika nilai Chi square-nya tidak signifikan. *H1:* Memilih model *fixed effect*, jika nilai Chi square-nya signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang di dapat dari data sekunder. Perkembangan data-data yang dianalisis dari tahun 2006 sampai tahun 2009 yang mencakup tujuh belas kabupaten dan sembilan kota yang ada di provinsi Jawa Barat dipaparkan pada beberapa tabel berikut.

Dari *Tabel 1* dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan PAD dari tahun ke tahun di seluruh kabupaten/kota. Namun di kabupaten Bandung barat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 tidak memiliki data dikarenakan terjadinya pemekaran di kabupaten Bandung itu sendiri, akan tetapi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sudah memiliki data tersendiri. Dari keseluruhan kabupaten dan kota di mana yang memiliki PAD paling besar ialah kota Bandung dikarenakan selain kota

Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2006 - 2009 (Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten dan Kota	Pendapatan Asli Daerah			
		2006	2007	2008	2009
1	Bogor	199.424	260.031	250.155	309.226
2	Sukabumi	53.645	45.940	51.691	875.62
3	Cianjur	60.174	66.675	63.711	87.867
4	Bandung	108.322	151.876	87.082	151.496
5	Garut	50.323	71.376	76.457	91.429
6	Tasikmalaya	35.440	24.309	17.239	37.671
7	Ciamis	24.966	36.177	29.039	46.561
8	Kuningan	35.731	37.415	36.225	52.748
9		92.348	99.318	112.468	116.133
10	Majalengka	50.043	47.818	35.966	53.530
11	Sumedang	58.699	60.564	63.472	90.533
12	Indramayu	51.147	415.09	24.441	68.615
13	Subang	58.782	506.41	47.568	68.801
14	Purwakarta	51.781	51.199	457.77	67.084
15	Karawang	112.643	89.231	88.641	115.412
16	Bekasi	172.659	166.250	155.093	200.653
17	Bandung Barat	0	0	24.136	35.508
18	Bogor	73.731	68.509	63.525	89.223
19	Sukabumi	36.577	43.848	45.546	57.237
20	Bandung	225.596	275.631	298.685	374.712
21	Cirebon	56.405	59.912	25.082	70.926
22	Bekasi	126.067	162.881	133.481	229.532
23	Depok	67.218	72.080	68.666	88.872
24	Cimahi	50.325	54.659	50.358	74.163
25	Tasikmalaya	50.829	24.309	53.405	60.880
26	Banjar	13.237	16.150	19.762	24.400
	Total	1.916.112	1.986.158	1.921.894	2.663.212

Sumber: BPS Jawa Barat, 2008-2010

Bandung adalah ibukota dari Jawa barat, Bandung juga merupakan salah satu kota yang ramai dikunjungi untuk berwisata, mulai dari wisata kuliner sampai dengan wisata belanja setelah Jakarta. Berdasarkan pada *Tabel 1*, kota Banjar adalah kota yang menghasilkan PAD paling sedikit dibanding kabupaten dan kota lainnya, hal ini disebabkan kota tersebut masih minimnya transaksi perekonomiannya dan juga jumlah penduduk yang sedikit, sehingga menyebabkan pemasukan kota Banjar jadi lebih sedikit.

Dari *Tabel 2* dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah industri dari tahun ke tahun di hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Namun dapat dilihat pada tahun 2006 dari seluruh kabupaten dan kota diumana jumlah industri tersebut masih sangat minim dikarenakan perhitungan tersebut tidak menyeluruh, maka yang terjadi jumlah tersebut

sangatlah sedikit dibanding pada tahun-tahun setelahnya yaitu 2007 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan sangat drastis dari ratusan jumlah unit industri sampai dengan ribuan jumlah unit industri, mulai dari industri kecil, menengah, dan industri besar.

Berdasarkan pada *Tabel 2*, kabupaten Sukabumi ialah kabupaten yang paling besar jumlah industrinya dan kabupaten Bandung barat yang paling sedikit jumlah industrinya dari kabupaten dan kota secara keseluruhan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Namun jika dilihat dari total keseluruhan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan yang cukup drastis, dan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami kenaikan lagi tetapi tidak banyak sampai melebihi tahun 2007, hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya industri yang tidak bisa berkembang sehingga ia harus gulung tikar.

Tabel 2. Jumlah Industri Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2006 - 2009 (Jumlah Unit)

No	Kabupaten dan Kota	Jumlah Industri			
		2006	2007	2008	2009
1	Bogor	85	14.574	14.747	14.797
2	Sukabumi	63	115.178	15.274	15.379
3	Cianjur	95	1.158	1.184	1.219
4	Bandung	175	13.173	13.277	13.469
5	Garut	7	9.710	9.746	9.774
6	Tasikmalaya	87	1.283	1.350	1.395
7	Ciamis	22	1.288	1.305	1.331
8	Kuningan	42	2.024	2.123	2.179
9	Cirebon	58	10.546	10.601	10.637
10	Majalengka	35	7.338	7.351	7.381
11	Sumedang	17	4.995	5.037	5.108
12	Indramayu	18	2.325	2.354	2.354
13	Subang	2	3.296	3.305	3.410
14	Purwakarta	26	10.636	10.705	10.791
15	Karawang	12	9.204	9.264	9.314
16	Bekasi	114	10.319	10.469	10.695
17	Bandung Barat	0	0	0	17
18	Bogor	113	7.395	8.020	8.089
19	Sukabumi	53	9.368	9.416	9.435
20	Bandung	72	10.674	10.816	10.817
21	Cirebon	17	9.324	9.342	9.352
22	Bekasi	52	9.692	9.822	9.881
23	Depok	18	10.097	10.138	10.201
24	Cimahi	0	6.044	6.059	6.071
25	Tasikmalaya	165	9.457	9.590	9.675
26	Banjar	37	9.122	9.148	9.182
	Total	1.385	298.220	200.443	218.936

Sumber: BPS Jawa Barat, 2008-2010

Dari *Tabel 3* dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun di hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Itu membuktikan bahwa di provinsi Jawa Barat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terus bertambahnya populasi penduduk, lebih banyak angka kelahiran di bandingkan dengan angka kematian, hal tersebut yang menjadikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat.

Berdasarkan pada *Tabel 3*, kota Cirebon adalah kota yang paling sedikit jumlah penduduknya dan kabupaten Bogor yang paling banyak jumlah penduduknya dari kabupaten dan kota secara keseluruhan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Banyaknya jumlah penduduk di provinsi Jawa Barat sangat mempengaruhi PAD di provinsi Jawa Barat itu sendiri, apalagi di setiap tahunnya terus mengalami

peningkatan yang cukup drastis, akan tetapi akan banyak dampak buruk akan terjadi dengan tidak seimbangnya pengeluaran yang dilakukan pemerintah setempat seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Dari *Tabel 4* dalam *Lampiran* dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan PDRB dari tahun ke tahun di seluruh kabupaten dan kota provinsi Jawa Barat. PDRB terbesar dimiliki oleh kabupaten Bekasi dan yang memiliki PDRB terkecil ialah kota Banjar.

Pemilihan Model dengan Uji Hausman

Pemilihan model dalam penelitian ini menggunakan uji Hausman untuk memilih model *Random Effect* atau *Fixed Effect*. *Tabel 5* menyajikan hasil uji Hausman:

Dari *Tabel 5* tentang hasil uji Hausman untuk pemilihan model menunjukkan bahwa nilai

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat 2006 – 2009 (Jumlah Orang)

No	Kabupaten dan Kota	Jumlah Penduduk			
		2006	2007	2008	2009
1	Bogor	4.216.186	4.316.236	4.402.026	4.453.927
2	Sukabumi	2.240.901	2.258.253	2.277.020	2.293.742
3	Cianjur	2.125.023	2.149.121	2.169.984	2.189.328
4	Bandung	4.399.128	3.038.038	3.116.056	3.148.951
5	Garut	2.375.725	2.429.167	2.481.471	2.504.237
6	Tasikmalaya	1.743.324	1.792.092	1.839.682	1.860.157
7	Ciamis	1.565.121	1.686.076	1.605.891	1.615.759
8	Kuningan	1.118.776	1.140.777	1.163.159	1.173.528
9	Cirebon	2.134.656	2.162.644	2.192.429	2.211.186
10	Majalengka	1.197.994	1.204.379	1.210.811	1.219.145
11	Sumedang	1.089.889	1.112.336	1.134.288	1.143.992
12	Indramayu	1.778.396	1.795.372	1.811.764	1.827.878
13	Subang	1.441.191	1.459.077	1.476.418	1.486.412
14	Purwakarta	784,797	798,272	809,962	819,005
15	Karawang	2.031.128	2.073.356	2.112.433	2.134.389
16	Bekasi	1.991.230	2.032.008	2.076.146	2.121.122
17	Bandung Barat	0	1.493.225	1.531.072	1.548.434
18	Bogor	855,846	866,034	876,292	895,596
19	Sukabumi	294,646	300,694	305,800	311,559
20	Bandung	2.340.624	2.364.312	2.390.120	2.414.704
21	Cirebon	285,363	290,45	298,995	304,152
22	Bekasi	2.040.258	2.084.831	2.128.384	2.176.743
23	Depok	1.393.568	1.412.772	1.430.829	1.465.826
24	Cimahi	506,251	518,985	532,114	547,862
25	Tasikmalaya	610,456	624,478	637,083	640,324
26	Banjar	177,118	180,744	184,577	185,993
	Total	40.737.594	41.483.729	42.194.869	42.693.951

Sumber: BPS Jawa Barat, 2008-2010

Tabel 5. Hasil Pemilihan Model dengan Uji Hausman

Model	Hausman Test	Chi Square Tabel	Keterangan	Hasil Pemilihan Model
$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_i$	6,939	7,8413	Nilai Hausman test < dari nilai Chi Square-tabel	Random Effect

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data

Hausman test < lebih kecil dari nilai *Chi Square* sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik untuk diestimasi adalah model *Random Effect*.

Hasil Estimasi Model *Random Effect*

Analisis ini dalam kajian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Industri, Jumlah Penduduk, dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat. Adapun bentuk persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_i \quad (8)$$

Keterangan: *Y* adalah pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat (Miliar Rupiah); *X1* adalah jumlah industri kabupaten/kota di Jawa Barat (Buah), *X2* adalah jumlah penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat (orang), *X3* adalah PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat (Miliar Rupiah), β_0 adalah konstanta, β_0 - β_3 adalah koefisien regresi, u_{it} adalah variabel gangguan, *i* adalah kabupaten/kota, *t* adalah periode waktu (tahun).

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil yang disajikan dalam *Tabel 6*.

Secara statistik hasil regresi menunjukkan hasil yang baik. Koefisien determinasi (*R*²)

yang bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel terikat memberikan angka cukup tinggi, yaitu sebesar 0,939. Hal ini menunjukkan kuatnya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Uji *t* digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan. Pengujian pengaruh variabel jumlah industri, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,0251; 0,0145; dan 0,000 yang berarti signifikan untuk pengujian pada α sebesar 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah sangat tergantung pada peningkatan besaran ketiga variabel tersebut.

Nilai konstanta hasil regresi secara keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 12.289,76. Adapun nilai konstanta masing-masing kabupaten merupakan informasi khusus untuk masing-masing kabupaten. Jika dibandingkan dengan nilai masing-masing nilai kon-

Tabel 6. Hasil Estimasi Model *Random Effect* Metode GLS

Variabel	Koefisien Regresi	t-statistik	Probabilitas
Konstanta	12289,76	0,917941	0,3609
Jumlah Industri	0,035310	2,039390	0,0251
Jumlah Penduduk	0,012003	2,167389	0,0145
PDRB	5,151244	6,234946	0,0000
R²	: 0,939		
DW-test	: 2,273		
N	: 36		

Sumber: Hasil Olah Data.

stanta kabupaten dan kota adalah sebagai berikut. Nilai konstanta kabupaten Sumedang sebesar -1.066,901; kabupaten Cianjur sebesar 1.539,507; kabupaten Banjar sebesar 209,392; kota Cirebon sebesar 7.362,598; kabupaten Kuningan sebesar -3.659.748; kota Tasikmalaya sebesar 9.139,122; kabupaten Majalengka sebesar 516,12; kabupaten Purwakarta sebesar 1.066,901; kabupaten Subang sebesar -7.233,228; dan Kabupaten Sukabumi 4.891,623 berada dibawah nilai konstanta secara keseluruhan, sedangkan kabuparten/kota lainnya berada di atas nilai konstanta secara keseluruhan. Hasil ini memberikan gambaran bahwa PAD otonom kabupaten kota tersebut, yaitu tingkat PAD yang diakibatkan oleh perubahan variabel lain pada kabupaten tersebut lebih rendah dari rata-rata PAD otonom kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. Adapun PAD otonom kabupaten/kota lainnya lebih besar dari rata-rata PAD di provinsi tersebut.

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa jumlah industri kabupaten/kota di Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini berarti, jika jumlah industri meningkat, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Barat juga akan meningkat. Dari analisis regresi tersebut menunjukkan jika jumlah industri naik sebesar 1 unit, maka PAD kabupaten/kota akan naik rata-rata sebesar 0,035310 miliar rupiah. Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat penting. Melalui kegiatan industri akan dihasilkan berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari peralatan sederhana sampai peralatan modern. Berkembangnya industri akan menghasilkan pajak barang dan sekaligus pajak pendapatan sehingga akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini berarti, jika jumlah penduduk mengalami peningkatan, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Barat akan meningkat signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk kabupaten/kota di Jawa Barat berdampak pada peningkatan potensi PAD kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,012003

miliar rupiah. Di negara sedang berkembang yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara. Dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula. Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia dipandang sebagai aset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai aset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertambahan jumlah penduduk akan menjadi faktor positif bagi pembangunan daerah sehingga berpotensi meningkatkan PAD.

Informasi lain dari analisis ini menunjukkan bahwa PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini berarti, jika PDRB kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Barat juga akan meningkat. Hasil analisis memberikan hasil bahwa jika PDRB kabupaten/kota naik sebesar 1 miliar rupiah, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Barat akan naik sebesar 5,151244 miliar rupiah. Apabila ditinjau dari segi pendapatan PDRB merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Temuan analisis ini juga menggambarkan bahwa 20 persen dari total PDRB akan diserap oleh sektor pemerintah daerah. Nilai ini juga mengindikasikan

bahwa nilai *tax ratio* kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat berada pada tingkat moderat.

SIMPULAN

Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa jumlah industri, penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat. Hal ini berarti, jika ketiga variabel tersebut meningkat, maka PAD kabupaten/kota di Jawa Barat juga akan meningkat. Hasil ini menggambarkan bahwa sektor pemerintah daerah sangat tergantung pada kegiatan ekonomi dan perkembangan industri di sektor swasta.

Untuk meningkatkan PAD kabupaten/kota di Jawa Barat, maka Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri di daerah dengan cara mendorong peningkatan investasi daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mendorong pertumbuhan Usaha-usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari sektor industri, misalnya dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, pengembangan inovasi produk, serta regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Halim. 2003. Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 7, No. 1.
- Adriani, Evi dan Handayani, Sri Indah. 2008. Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap PAD Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah*, Vol 8, No.2.
- BPS. 2006-2009. Jawa Barat dalam Angka. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik
- BPS. 2006-2009. Jumlah Penduduk Jawa Barat. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik.
- Kenward, Lloyd R. 2004. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 40 (1): 9-35.
- Lledo, Victor Duarte. 2005. Tax Systems under Fiscal Adjustment: A Dynamic CGE Analysis of the Brazilian Tax Reform, *IMF Working Paper* WP/05/142, New York: International Monetary Fund.
- Marks, Stephen V. 2004. Fiscal Sustainability And Solvency: Theory and Recent Experience in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 40, No. 2,227-42.
- Merifield, John. 2000. State Government Expenditure Determinants and Tax Revenue Determinants Revisited, *Public Choice*, 102: 25-50.
- Octaviani, Dian. 2001. Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke. *Media Ekonomi*, Vol. 7, No. 8, 100-118.
- Riduansyah, Muhammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol.7, No. 2.
- Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Fuji. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-kaktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol 3, No.1.
- Sasana, Hadi. 2005. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Studi Kasus di kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol.2, No.1.
- Siagian, Monika. 2008. pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah terhadap Belanja Pemerintah Daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol 2, No. 2.

LAMPIRAN

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Barat 2006-2009 (Miliar Rupiah)

No	Kabupaten dan Kota	PDRB			
		2006	2007	2008	2009
1	Bogor	26.546	28.151	29.721	30.952
2	Sukabumi	7.405	7.715	8.015	8.308
3	Cianjur	7.048	7.343	7.640	7.939
4	Bandung	17.640	18.648	19.674	20.527
5	Garut	9.129	9.563	10.011	10.568
6	Tasikmalaya	4.511	4.707	4.896	5.291
7	Ciamis	6.116	6.422	6.739	7.071
8	Kuningan	3.330	3.470	3.619	3.778
9	Cirebon	6.670	7.027	7.372	7.748
10	Majalengka	3.686	3.866	4.042	4.225
11	Sumedang	4.694	4.912	5.137	5.381
12	Indramayu	12.621	12.956	13.234	13.870
13	Subang	6.174	6.473	6.780	7.103
14	Purwakarta	5.964	6.197	6.506	6.849
15	Karawang	15.568	16.525	17.553	19.195
16	Bekasi	43.793	46.481	49.302	51.789
17	Bandung Barat	6.466	6.811	7.158	7.464
18	Bogor	3.782	4.013	4.253	4.508
19	Sukabumi	1.509	1.607	1.705	1.810
20	Bandung	23.043	24.942	26.979	29.228
21	Cirebon	5.192	5.513	5.824	6.116
22	Bekasi	12.453	13.255	14.042	14.622
23	Depok	5.066	5.418	5.771	6.129
24	Cimahi	5.369	5.639	5.908	6.180
25	Tasikmalaya	3.098	3.283	3.470	3.668
26	Banjar	616	646	677	712
	Total	247.490	261.619	276.029	22.840.459

Sumber: BPS Jawa Barat, 2008-2010